

## **BAB III**

### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Pembangunan ekonomi nasional dan daerah bertujuan antara lain untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga stabilitas harga melalui pengendalian tingkat inflasi dan mengatasi pengangguran, Oleh karena itu, sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci tercapainya kesejahteraan masyarakat, Bentuk sinergitas dapat terlihat dari penyusunan perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, Begitu halnya, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan pada arahan prioritas nasional dan rencana kerja provinsi Bali serta mengacu pada RPJMD-SB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.

Perencanaan tahun 2018 tidak akan lepas dari asumsi perkembangan kondisi perekonomian kabupaten di masa yang akan datang. Dari asumsi tersebut akan dilakukan pengembangan kebijakan guna mencapai visi misi pembangunan daerah. Pengembangan kebijakan akan didasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta sasaran pokok yang ingin dicapai. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2018 memberikan gambaran makro kondisi terakhir perekonomian Kabupaten Tabanan, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2018, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2018 dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2018 merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 dan memberi gambaran tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi

daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2018 merupakan tahap ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2018 tidak terlepas dari arahan prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan pemerintah Provinsi Bali dengan tetap memperhatikan penanganan isu-isu strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD-SB Kabupaten Tabanan 2016-2021.

Berdasarkan arahan prioritas pembangunan tahun 2018, arah kebijakan pembangunan bertujuan untuk memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang diukur melalui 4 (empat) indikator utama yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pengendalian laju inflasi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2018 menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi disparitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong sinergi antar skala usaha berbasis pertanian melalui pembangunan pusat – pusat pertumbuhan dan mewujudkan *fair trade* dengan mengedepan ekonomi desa sebagai pengungkit ekonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut. arah kebijakan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator dan target capaian Tahun 2016 – 2017 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten  
Tabanan Tahun 2016 – 2018

Indikator	Tahun								
	2016			2017			2018*		
	Nasion al	Pro. Bali	Kab. Tabanan	Nasional	Pro. Bali	Kab. Tabanan	Nasional	Pro. Bali	Kab. Tabanan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	6,26	<b>6,49</b>	5,2	6,7	<b>6,99</b>	6,1	6,7	<b>7</b>
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	1,89	<b>2,89</b>		2,2	<b>1,9</b>	4,4	2	<b>1,9</b>
Angka Kemiskinan	10,86	4,15	<b>5,61</b>	9,5	3,2	<b>5,55</b>	8,5	2,6	<b>5,25</b>
Laju Inflasi	3,02	3,12	<b>2,75</b>	3,5	5,43	<b>2,75</b>	3,5	5,76	<b>2,75</b>
Gini Rasio	0,39	0,37	<b>0,33</b>	0,36	0,34	<b>0,3</b>	0,3	0,33	<b>0,29</b>

### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Dari basis data gambaran kondisi ekonomi Kabupaten Tabanan berdasarkan kondisi tahun 2015. Kondisi ekonomi Kabupaten Tabanan menunjukkan perkembangan positif dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6.24 persen pada tahun 2015 diatas capaian Provinsi Bali sebesar 6.03 persen dan Nasional sebesar 5.02 persen. Capaian ini sangat mengembirakan mengingat selama kurun waktu 2011-2014 laju pertumbuhan ekonomi Tabanan selalu berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali. Dengan arah kebijakan melalui program-program inovatif diharapkan ekonomi Tabanan mampu tumbuh pada kisaran 6,7 persen hingga 7 persen pada tahun 2018 atau lebih cepat dari target RPJPD Kabupaten Tabanan 2005 – 2025 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Tabanan sebesar 7 persen pada akhir periode RPJPD.

**Tabel 3,2**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan 2011 – 2017

Wilayah	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
Nasional	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02	5,2
Bali	6,66	6,96	6,69	6,73	6,03	6,26	6,7
Tabanan	6,11	6,12	6,45	6,53	6,24	6,49	6,99

Sumber Sumber: BPS, Tabanan Dalam Angka 2016

\*Angka sementara

\*\* Angka prediksi/target RPJMN/RPJMD

Dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah, hal yang tidak dapat diabaikan menyangkut kualitas pertumbuhan ekonomi, untuk melihat kondisi tersebut ditinjau dari tingkat gini rasio. Gini Rasio digunakan untuk melihat ketimpangan atau ketidakmerataan penguasaan faktor-faktor ekonomi dengan ukuran gini rasio 0 – 1 dengan kriteria  $< 0,4$  masuk pada katagori ketimpangan rendah,  $0,4 - < 0,5$  katagori sedang dan  $> 0,5$  masuk pada katagori ketimpangan tinggi.

Pada periode 2011 – 2015, Gini Rasio Kabupaten Tabanan masuk pada katagori rendah hanya pada tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 0,40 atau katagori sedang dan termasuk ketimpangan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Bali. Meskipun rendah, penting kiranya usaha dalam peningkatan ekonomi pedesaan berbasis pertanian tetap menjadi focus utama sehingga gini rasio dapat diperkecil setiap tahunnya.

**Tabel 3.2**

Gizi Rasio Per-Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2011 – 2015

Wilayah	Gizi Rasio				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Jembrana	0,40	0,37	0,37	0,39	0,31
Kab. Tabanan	0,36	0,35	0,39	0,40	0,36
Kab. Badung	0,34	0,33	0,35	0,34	0,31
Kab. Gianyar	0,33	0,34	0,33	0,38	0,32
Kab. Klungkung	0,38	0,35	0,36	0,35	0,37
Kab. Bangli	0,27	0,31	0,31	0,33	0,38
Kab. Karangasem	0,29	0,29	0,33	0,34	0,31
Kab. Buleleng	0,34	0,33	0,38	0,39	0,34
Kota Denpasar	0,34	0,42	0,36	0,38	0,36
Provinsi Bali	0,41	0,43	0,40	0,42	0,38
Nasional	0,39	0,41	0,41	0,41	0,40

Selain angka gini rasio, hal juga yang harus menjadi perhatian penting adalah angka kemiskinan karena gini rasio dan angka kemiskinan memiliki keterkaitan erat. Persentase penduduk miskin angkanya berfluktuasi. Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Tabanan mengalami penurunan 0,09 persen. Angka ini masih diatas Provinsi Bali sebesar 4,47 persen dan untuk Kabupaten/Kota se-Bali, angka kemiskinan Kabupaten Tabanan berada pada posisi 4 (empat) terendah setelah Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tabanan perlu peningkatan upaya yang sistematis dalam pengentasan kemiskinan. Upaya yang sistematis yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesempatan orang miskin untuk berusaha didesa tempat tinggalnya dan mendapatkan penghasilan yang layak dari kegiatan tersebut. Pelaksanaan Gerbang Pangan Serasi, Beras Sehat dan Keramba Emas telah menunjukkan pergerakan yang positif namun perlu pengembangan atau pelebaran jangkauan penerima manfaatnya.

**Tabel 3.3**  
Angka Kemiskinan Per-Kabupaten/Kota se-Bali  
Tahun 2011 - 2015

WILAYAH	Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>NASIONAL</b>	<b>12,49</b>	<b>11,66</b>	<b>11,46</b>	<b>11,25</b>	<b>11,13</b>
<b>BALI</b>	4,59	3,95	4,49	4,76	4,74
Jembrana	6,60	5,70	5,56	5,83	5,84
<b>Tabanan</b>	<b>5,60</b>	<b>4,90</b>	<b>5,21</b>	<b>5,61</b>	<b>5,52</b>
Badung	2,60	2,20	2,46	2,54	2,33
Ginyar	5,40	4,70	4,27	4,57	4,61
Klungkung	6,10	5,40	7,01	7,01	6,91
Bangli	5,20	4,50	5,45	5,86	5,73
Karangasem	6,40	5,60	6,88	7,30	7,44
Buleleng	5,90	5,20	6,31	6,79	6,74
Denpasar	1,80	1,50	2,07	2,21	2,39

Meskipun capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan prediksi pertumbuhan ekonomi Tabanan Tahun 2017 cukup moderat, namun bila dilihat dari struktur ekonomi Tabanan terjadi pergeseran dengan dominasi sektor jasa, sementara pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB justru pertumbuhan sektor ini mengalami pertumbuhan dibawah 2 persen. Begitu pula dengan sektor olahan, meskipun memiliki kontribusi diatas 10 persen sektor ini masih belum sepenuhnya memanfaatkan bahan baku lokal. Kondisi ini menjadi tantangan perekonomian Kabupaten Tabanan pada tahun mendatang.

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk melihat pertumbuhan dan struktur ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB. Secara nominal (absolute) tahun 2015 atas harga berlaku mencapai 17,20 Triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 12,65 Triliun rupiah atau meningkat sebesar 2,14 Triliun rupiah dibanding dengan tahun 2014. Kondisi mengalami peningkatan sebesar 0,03 Triliun dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 3,1  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Sektor Tahun 2015 (triliun rupiah)

NO.	LAPANGAN USAHA	DHB	DHK
1	Pertanian	3,96	2,73
2	Pertambangan & Penggalian	0,22	0,16
3	Industri Pengolahan	1,03	0,77
4	Perdagangan Listrik, Gas	0,02	0,01
5	Pengadaan Air	0,03	0,02
6	Konstruksi	1,65	1,26
7	Perdagangan	1,48	1,11
8	Transportasi dan pergudangan	0,27	0,21
9	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	3,73	2,31
10	Informasi dan komunikasi	0,91	0,86
11	Jasa Keuangan	0,65	0,46
12	Real Estate	0,90	0,75
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,20	1,09
15	Jasa Pendidikan	0,29	0,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,31
17	Jasa Lainnya	0,31	0,24
<b>JUMLAH</b>		<b>7,20</b>	<b>2,65</b>

Sumber : Tabanan Dalam Angka 2016

Dari sisi pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan sektor tersier masih mendominasi, sektor ini memberikan sumbangan sebesar 59,86 persen kemudian disusul oleh sektor primer sebesar 30,27 persen dan sektor sekunder sebesar 9,87 persen, Jika dilihat dari nilai absolutnya, baik atas harga konstan maupun harga berlaku, pertumbuhan ekonomi sektor primer masih berada dibawah pertumbuhan sektor sekunder dan sektor tersier. Hal ini menunjukkan ada perubahan struktur perekonomian Kabupaten Tabanan dimana peran sektor primer dalam pembentukan PDRB mulai mengalami pergeseran kesektor sekunder dan tersier (*Tabanan Dalam Angka 2016*).

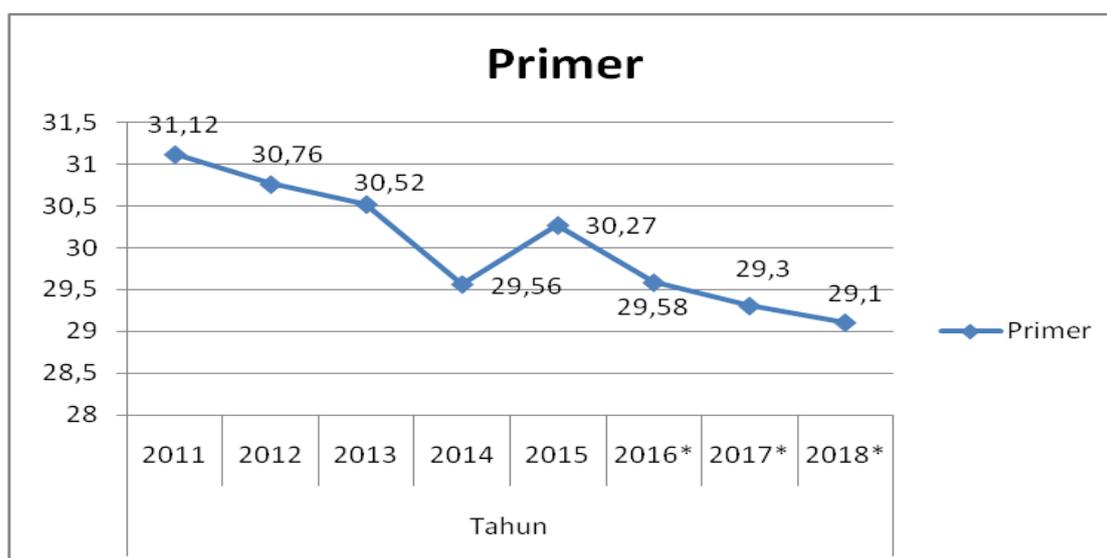
Sektor	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*
Primer	31,12	30,76	30,52	29,56	30,27	29,58	29,3	29,1	29,07
Sekunder	9,67	10,89	10,72	10,01	9,87	10,09	10,04	9,89	9,62
Tersier	59,21	58,35	58,76	60,43	59,86	60,34	60,66	61,01	61,31
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, *Tabanan Dalam Angka 2016*

\*Angka Prediksi

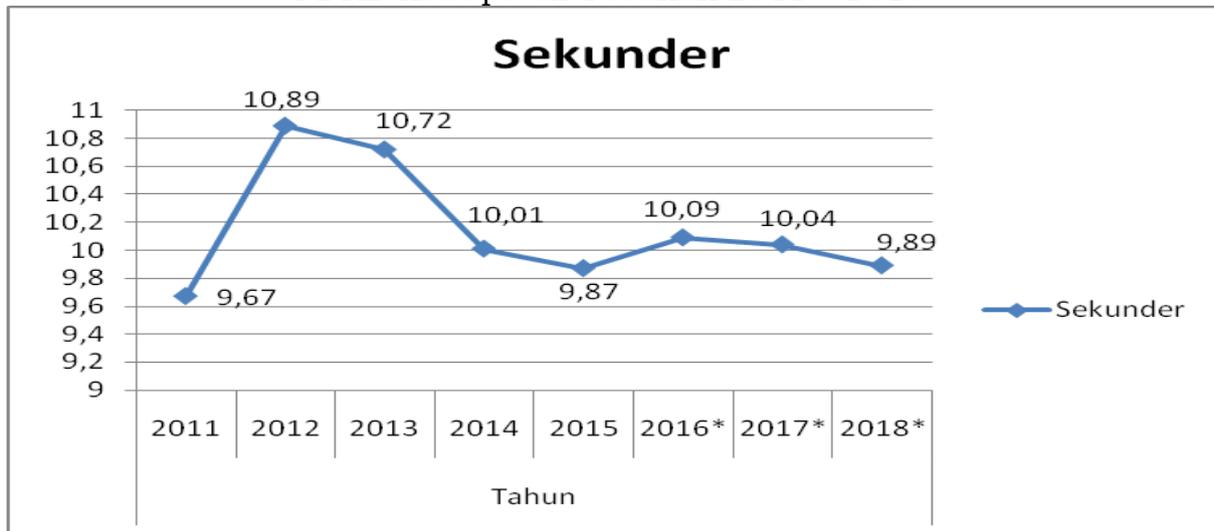
Berikut gambaran perkembangan dan prediksi kontribusi per kelompok sektor pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2011 – 2019,

**Gambar 3,1**  
Perkembangan Kontribusi Sektor Primer (%) Terhadap Pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan 2011 – 2018

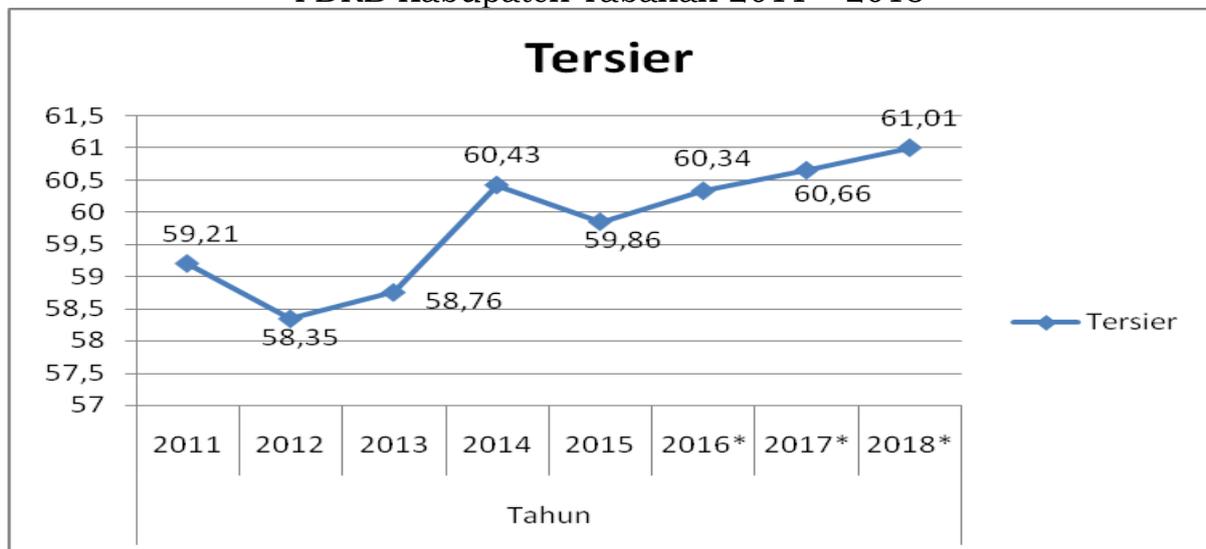


Melihat trend penurunan sektor primer, maka arah kedepan untuk lebih menekankan sektor ini mengingat basis ekonomi Tabanan berada pada sektor pertanian dalam arti luas melalui program unggulan daerah.

**Gambar 3.2**  
Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder (%) Terhadap Pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan 2011 – 2018



**Gambar 3.3**  
Perkembangan Kontribusi Sektor Tersier (%) Terhadap Pembentuk PDRB Kabupaten Tabanan 2011 – 2018



**b. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan**

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan periode 2011 – 2015 rata-rata mencapai 6,29 persen, Dari 17 (tujuh belas) sektor/lapangan usaha pembentuk PDRB, laju pertumbuhan masing-masing sektor bersifat

fluktuatif dengan laju pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa, namun bila dicermati kontribusi sektor jasa terhadap PDRB masih dibawah kontribusi sektor pertanian. Oleh karena itu laju pertumbuhan ekonomi tidak ditopang oleh sektor basis yakni sektor pertanian.

**Tabel 3.2**  
Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Tabanan  
Tahun 2011 s.d. 2015

<b>NO</b>	<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>	<b>2015**</b>
1	Pertanian	1,15	5,54	2,43	3,58	1,97
2	Pertambangan & Penggalian	10,28	14,43	8,17	-	4
3	Industri Pengolahan	0,78	4,08	9,17	8,87	10,82
4	Perdagangan Listrik, Gas	8,6	9,54	8,81	4,02	1
5	Pengadaan Air	0,06	1,99	6,31	7,49	1,97
6	Konstruksi	6,44	17,95	6,74	1,96	6,94
7	Perdagangan	5,53	4,49	9,92	7,57	9,26
8	Transportasi dan pergudangan	3,26	3,42	6,92	8,72	3,32
9	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	6,37	6,17	8,38	6,76	5,56
10	Informasi dan komunikasi	8,63	6,84	6,54	7,33	9,68
11	Jasa Keuangan	4,97	7,65	14,18	9,88	4,94
12	Real Estate	4,21	5,12	7,74	9,16	6,57
13	Jasa Perusahaan	3,02	0,84	10,01	7,85	7,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	25,46	-	0,64	11,12	8,28
15	Jasa Pendidikan	10,69	1	14,59	10,99	11,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,22	4,76	13,62	12,79	12,62
17	Jasa Lainnya	6,88	3,67	4,9	8,06	9,68
<b>PDRB</b>		<b>6,11</b>	<b>6,12</b>	<b>6,45</b>	<b>6,53</b>	<b>6,24</b>

Sumber : Tabanan Dalam Angka 2016

Melihat pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa perkembangan struktur perekonomian Tabanan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan pergeseran dari sektor primer (pertanian dan penggalian) ke sektor tersier (perdagangan, hotel & restoran, dan jasa-jasa), dan ke sektor sekunder (industri, listrik & air minum, dan bangunan), Pergeseran ini dipicu keberadaan Kabupaten Tabanan sebagai penyangga

Kabupaten Badung dan Denpasar sehingga ada kebutuhan perumahan akibatnya terjadi alih fungsi lahan pertanian.

Hal ini terlihat dari penurunan kontribusi per lapangan usaha pembentuk PDRB. Kontribusi sektor pertanian menurun dari 24,03 persen di tahun 2011 menjadi 23,04 persen di tahun 2015 (Tabel 3.3). Jika dilihat lebih dalam pada sektor pertanian, semua cabang usaha pertanian menunjukkan penurunan kecuali pada tanaman pangan. Perkembangan kontribusi tanaman pangan sangat mengembirakan karena menunjukkan pertumbuhan ditengah tekanan sektor lainnya. Perkembangan ini dapat dimaknai suksesnya beberapa program pembangunan pertanian di Kabupaten Tabanan yakni melalui pelaksanaan Gerbang Pangan Serasi dari tahun 2013 yang membina subak menjadi organisasi tani yang lebih modern mengelola kegiatan pertaniannya. Hal ini didukung pula kebijakan pembelian beras petani binaan Gerbang Pangan Serasi oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

### **c. PDRB Per-Kapita**

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai PDRB pada tahun berjalan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian besar kecilnya PDRB per kapita suatu daerah tidak hanya tergantung pada besarnya nilai PDRB saja tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk pada daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tabanan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana pula pada PDRB atas harga konstan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Tabanan adalah 14,12 juta rupiah. Ini berarti kinerja ekonomi Kabupaten Tabanan sepanjang tahun 2015 tampaknya mengalami perbaikan seiring dengan semakin pulihnya kondisi keamanan yang merupakan faktor penting pendukung sektor pariwisata Kabupaten Tabanan.

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Bali, PDRB per kapita Kabupaten Tabanan berdasarkan harga berlaku tahun 2014 berada pada urutan ke-tujuh dari sembilan daerah. Hal ini menunjukkan pada tingkat

yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu berada di atas Kabupaten Bangli dan Karangasem. Populasi penduduk Kabupaten Tabanan yang relatif cukup besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain telah memposisikan Tabanan pada peringkat ke-tujuh meskipun nilai PDRB Kabupaten Tabanan relatif cukup besar yaitu peringkat enam setelah Kabupaten Badung, Denpasar, Buleleng dan Gianyar.

**Tabel 3.2**  
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Bali Tahun 2011 - 2015

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Jembrana	21,574	23,810	26,194	28,991	33,431	37,825
Kab. Tabanan	22,082	24,355	26,812	30,114	34,770	39,465
Kab. Badung	38,135	41,912	47,305	53,972	61,495	66,974
Kab. Gianyar	23,118	25,475	28,272	31,620	36,510	40,502
Kab. Klungkung	20,924	23,064	25,435	28,176	32,473	36,496
Kab. Bangli	12,713	14,021	15,375	17,179	19,799	22,418
Kab. Karangasem	16,968	18,608	20,466	22,985	26,525	30,104,79
Kab. Buleleng	21,750	24,100	26,686	29,992	34,779	39,448,77
Kota Denpasar	25,610	27,949	31,148	34,730	39,613	43,79
<b>Provinsi Bali</b>	<b>23,992</b>	<b>26,433</b>	<b>29,443</b>	<b>33,135</b>	<b>38,096</b>	<b>42,663</b>

*Sumber : BPS Prov, Bali*

PDRB perkapita Kabupaten Tabanan atas harga berlaku tahun 2015 adalah sebesar Rp. 39,465 juta atau rata-rata penghasilan penduduk Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 3,288 juta per bulan, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019.**

#### **a. Tantangan Global dan Nasional**

Kondisi ekonomi global masih ditandai risiko terhadap pemulihan ekonomi, sementara harga komoditas global masih rendah, dan arus modal (inflow) ke negara berkembang terbatas. Momentum perbaikan ekonomi

global diperkirakan terjadi pada 2016, masih belum sepenuhnya kelihatan bahkan sebaliknya masih mengalami perlemahan di sejumlah negara. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia di 2016 diperkirakan hanya sekitar 3,1%. Sementara itu, di Amerika Serikat (AS) yang awalnya diperkirakan dapat menjadi pendorong perekonomian global namun pada perkembangannya masih belum menampakkan kondisi yang solid meski semakin membaik sebagaimana tercermin dari menguatnya sektor tenaga kerja dan meningkatnya inflasi. Begitu pula di Eropa, pasca hasil Brexit yang memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa, semakin menurunkan prospek ekonomi di kawasan Eropa.

Dinamika perekonomian global tersebut mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang pada gilirannya mengakibatkan turunnya produktivitas ekonomi dan kapasitas produksi di di banyak negara. Salah satu permasalahan struktural ekonomi global tersebut adalah berkurangnya pengaruh pertumbuhan ekonomi global terhadap perdagangan dunia. Berdasarkan data yang ada, korelasi PDB dunia dengan volume perdagangan tidak sekuat sebelumnya. Elastisitas pertumbuhan ekonomi dunia terhadap perdagangan dunia menurun dari 1,3 pada tahun 2000-an menjadi 0,9. Hasil berbagai studi menjelaskan bahwa ini didorong oleh faktor-faktor terutama menurunnya investasi global dan meningkatnya isu proteksionisme perdagangan dunia. Ujungnya, dunia diperkirakan akan menghadapi kelesuan ekonomi dalam waktu lebih lama dan 2017 hingga Tahun 2020 diperkirakan masih akan di bawah 4%.

### **Perkembangan Ekonomi Domestik**

Di sisi domestik, sebagai negara *small open economy*, perkembangan global yang belum sepenuhnya kondusif dan diwarnai ketidakpastian yang tinggi mempengaruhi kinerja perekonomian nasional yang tumbuh terbatas. Hingga triwulan III 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% (yoy) meski lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada keseluruhan tahun dapat tumbuh sekitar 5% meski lebih rendah dibandingkan perkiraan sekitar 5,3% sebelumnya akibat dampak ekonomi global yang tumbuh lebih rendah dibandingkan prakiraan sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif baik

dibandingkan negara-negara lain. Kondisi ini terutama faktor permintaan domestik masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional. Secara spasial, perekonomian wilayah Jawa yang berbasis lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan pertanian masih menjadi penopang utama dengan tumbuh di atas 5%. Sementara itu, di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua masih terdapat provinsi yang tumbuh di bawah 4% sehingga perlu terus mendapat perhatian. Di sisi harga, inflasi terjaga dalam level yang rendah dan stabil yakni mencapai 3,02% pada 2016 lebih rendah dari Tahun 2015 sebesar 3,4%. Inflasi yang rendah ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengendalikan harga kelompok makanan dan komoditas strategis.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi.

Potensi kedua yang mengemuka dan perlu mendapat catatan khusus pada 2016 ialah munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui program Pengampunan Pajak. Hal ini dapat menjadi momentum kuat bagi Pemerintah untuk mempercepat reformasi perpajakan di Indonesia. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui program Pengampunan Pajak diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna semakin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, peran pajak dalam pembiayaan pembangunan baru mencapai 11% dari PDB di tahun 2015, lebih rendah dibandingkan capaian berbagai negara kawasan seperti Singapura dan Malaysia yang mencapai sekitar 14% dari PDB.

Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy*

yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech* (*financial technology*) dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik.

#### **b. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tabanan.**

Tantangan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Tahun 2017 tidak lebih mudah dibandingkan Tahun 2016. Perkembangan peran pengeluaran konsumsi rumah tangga Tahun 2017 diantaranya diperkirakan akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah komoditas yang harganya diatur pemerintah. seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kelompok rumah tangga konsumen 900 VA, penyesuaian harga BBM non subsidi serta perubahan harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan harga komoditas lainnya yang dinamis.

#### **Analisis Atas Kondisi Internal (Kekuatan dan Kelemahan)**

##### **- Kekuatan**

Dalam rangka mewujudkan sinergi pertanian dengan pariwisata serta memberikan nilai tambah pada sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabanan ke depan akan menggiatkan pengembangan pariwisata melalui pengembangan desa wisata, agrowisata, atau ekowisata. Model ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga pendapatan dari sektor pariwisata dapat dinikmati oleh masyarakat desa atau petani. Desa wisata, agrowisata, atau ekowisata tidak berorientasi mengubah wajah desa dengan mendirikan hotel dan fasilitas wisata seperti model konvensional, namun melalui model ini diharapkan rumah penduduk, lingkungan alami desa, dan tradisi masyarakat lokal mampu menjadi daya tarik (atraksi) bagi wisatawan. Tabanan memiliki desa/kawasan yang memiliki karakteristik alam dan tradisi yang tidak kalah uniknya dengan daerah lain di Provinsi Bali. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan terus melakukan perbaikan dalam hal aksesibilitas ke daerah tujuan wisata. bantuan fasilitas penunjang, serta peningkatan kemampuan SDM/kelembagaan pariwisata untuk membangkitkan pariwisata yang

bersinergi dengan pertanian. Meningkatnya kunjungan pariwisata Bali dalam beberapa tahun terakhir memberikan prospek yang sangat baik bagi Tabanan dalam pengembangan desa wisata/agrowisata/ekowisata sebagai model pariwisata alternatif pada tahun-tahun mendatang.

- **Kelemahan**

Pertanian sebagai basis ekonomi Tabanan menghadapi masalah dan tantangan yang tidak ringan. Minat masyarakat menggeluti usaha pertanian sudah nampak semakin menurun. Fenomena pertanian sebagai usaha sampingan (*secondary job*) cenderung meningkat. Secara faktual, sulit dipungkiri bahwa saat ini pertanian belum dapat menjanjikan harapan hidup layak bagi masyarakat. Tingginya kesenjangan antara nilai tambah yang dihasilkan sektor pariwisata di tengah beragam permasalahan klasik sektor pertanian yang belum mendapatkan solusi penanganan, berdampak tidak saja pada pergeseran struktur bangunan ekonomi, namun juga telah berpengaruh pada pola dan gaya hidup (*life-style*) sebagian besar masyarakat Bali, termasuk Tabanan. Kondisi-kondisi tersebut menjadi pemacu terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara berkesinambungan.

Keterpaduan antara pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai tiga pilar penyangga ekonomi Tabanan khususnya dan Bali umumnya nampaknya masih belum berjalan secara sinergis. Melajunya sektor pariwisata tidak beriringan dengan pertumbuhan sektor pertanian, malahan pengembangan pariwisata lebih dominan mengorbankan lahan pertanian secara permanen untuk fasilitas pariwisata dan pendukungnya. Di samping itu, tekanan terhadap lahan pertanian juga datang dari penduduk yang bekerja di Kota Denpasar yang memilih lahan perumahan di Tabanan karena harganya lebih terjangkau. Pada sisi lain, keunikan pariwisata Bali justru terletak pada budaya masyarakatnya yang *notebene* berasal dari budaya agraris/pertanian. Usaha-usaha kecil, menengah, atau besar yang bergerak dalam pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambahnya juga masih sangat terbatas.

Kendala serius yang masih menghambat aktivitas ekonomi Tabanan adalah tingkat kerusakan infrastruktur jalan yang cukup tinggi. Dari 891,3 km jalan kabupaten, hanya 30 persen dalam kondisi baik, Keterbatasan

anggaran, inefisiensi penanganan, dan tingginya intervensi non teknis dalam penanganan jalan menjadi faktor yang sangat krusial menghambat upaya mempercepat peningkatan kualitas jalan di Tabanan. Permasalahan infrastruktur harus menjadi prioritas penanganan agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan rendahnya daya saing produk yang dihasilkan masyarakat Tabanan.

Permasalahan lain yang juga disadari masih menjadi hambatan pembangunan ekonomi di Tabanan adalah belum lengkapnya regulasi menyangkut kepastian berusaha di Tabanan. Disadari pula proses perijinan investasi di Tabanan belum memenuhi harapan masyarakat berkaitan dengan perijinan penanaman modal yang mudah, murah, dan cepat, Pemerintah Kabupaten Tabanan bertekad untuk membenahi perangkat perijinan tersebut secara bertahap yang arahnya pada proses pelayanan perijinan secara elektronik (*e-gov*). Sebelum sampai pada pelayanan perijinan yang berbasis teknologi informasi (TI), perangkat-perangkat pendukung seperti peraturan, kelembagaan, tatalaksana, SDM, gedung kantor, sarana kerja dan lain-lain menjadi suatu prasyarat harus digarap terlebih dahulu.

### **Analisis Atas Kondisi Eksternal (Peluang dan Ancaman)**

#### **- Peluang**

Dengan membaiknya kondisi kepariwisataan Bali, prospek ekonomi Tabanan masih cukup baik dengan syarat ada upaya yang cepat dalam perbaikan infrastruktur jalan. Tabanan masih menjadi pemasok utama dari kebutuhan konsumsi bahan makanan penduduk dan wisatawan Bali.

#### **- Ancaman**

Sebagai *hinterland* Kota Denpasar dan Badung, Tabanan sangat menarik sebagai tempat berkembangnya permukiman-permukiman baru sehingga akan menciptakan peluang kerja baru dalam sektor konstruksi/bangunan. Pada sisi lain, akan terjadi tingginya permintaan lahan yang berakibat pada meningkatnya alih fungsi lahan pertanian. Kepatuhan terhadap arahan penggunaan ruang harus dijaga dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Berkembangnya pariwisata di Bali saat ini belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga terjadi kesenjangan antar daerah. Manfaat terbesar diterima oleh Kabupaten Badung dan Denpasar sebagai penerima pajak hotel dan restoran yang terbanyak, sedangkan daerah lain lebih dominan menjadi obyek kunjungan sementara. Kondisi ini menyebabkan terjadi *gap* pendapatan daerah yang sangat besar antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan kabupaten lainnya di Bali. PAD Tabanan dari pajak hotel dan restoran berkisar Rp 9 M per tahun, sedangkan Kabupaten Badung telah mencapai lebih dari Rp. 850 milyar.

Berdasarkan identifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, proyeksi keuangan daerah dan perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun 2018 ditekankan pada pembangunan infrastruktur melalui program unggulan daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain infrastruktur isu yang mengemuka adalah permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data PPLS tahun 2011, tingkat kemiskinan Kabupaten Tabanan masih diangka 5,62 sedangkan target dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (DSPKD) diangka 5,3. Hal ini menjadi beban berat bagi pemerintah kabupaten untuk segera melakukan langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai target terlebih dalam RPJMD 2011-2015 diharapkan angka kemiskinan Kabupaten Tabanan berada dibawah Provinsi Bali yang di tahun 2011 ada di angka 4,59. Kedua isu tersebut diatas harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan kebijakan perekonomian selain menjaga stabilitas pertanian.

Dengan asumsi peningkatan anggaran penanganan jalan yang signifikan pada tahun sebelumnya dan telah dimanfaatkan secara efektif serta tidak terjadi kejadian serangan hama/penyakit tanaman pangan seperti kejadian tahun 2010, maka pertumbuhan ekonomi Tabanan akan mampu mencapai target 6,0 – 6,5 persen pada tahun 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaku ekonomi dominan di Tabanan adalah pengusaha yang tergolong ke dalam UMKM dan komoditas pertanian masih menjadi *core-bisnis* sebagian besar penduduk Tabanan. Demikian pula, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian daerah Bali, termasuk Kabupaten Tabanan sangat tergantung dari sektor pariwisata. Menyadari

potensi dan peluang yang dimiliki serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Tabanan menempuh berbagai kebijakan untuk memacu aktivitas perekonomian daerah.

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah berikut ini :

1. Peningkatan infrastruktur wilayah melalui program Gerakan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Pembangunan Infrastruktur Bagi Masyarakat Miskin (“Gempur Miskin”) yang dicanangkan di tahun 2017 dan akan dilaksanakan di tahun 2018 diharapkan mendapat respon positif dari masyarakat. Program ini bertujuan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam membenahi infrastruktur di wilayahnya masing-masing dengan mengalokasikan sejumlah pagu anggaran. Di samping itu, membangun jalan kabupaten setiap tahun proporsinya terus ditingkatkan dan konstruksinya telah diubah dari *lapen* menjadi *hotmix*.

Porsi lain untuk peningkatan infrastruktur adalah melalui pendanaan partisipatif infrastruktur dengan memberikan bantuan material/bahan bagi masyarakat sedangkan pengerjaannya sendiri dilakukan oleh masyarakat. Hal ini adalah untuk membangkitkan semangat gotong royong dan rasa memiliki yang lebih tinggi untuk melihara prasarana yang dibangun sendiri oleh masyarakat yang saat ini sedang dicarikan regulasinya.

2. Gerakan pembangunan ekonomi berbasis potensi desa di Kabupaten Tabanan telah dicanangkan dalam bentuk “Program Keramba Emas” dan telah mendapat jaminan kepastian pendanaan setiap tahun dari APBD. Wujud nyata program ini pembentukan BUMDes di setiap desa yang bersifat ekonomi kreatif yang disinergikan dengan BUMD Darma Santika.

3. Membuka peluang bagi masuknya penanam modal untuk mengembangkan akomodasi wisata di Kawasan Wisata Soka, Kawasan Wisata Soka meliputi 7 (tujuh) desa, yaitu: Desa Lalang Linggah

(Kecamatan Selemadeg Barat), Desa Antap dan Berembeng (Kecamatan Selemadeg), Desa Tegal Mengkeb dan Beraban (Kecamatan Selemadeg Timur), serta Desa Tibubiyu dan Kelating (Kecamatan Kerambitan), Luas kawasan adalah seluas 4,795 ha. Strategi pengembangan pariwisata juga diarahkan pada pengembangan desa wisata, agrowisata, atau eko wisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sebagaimana yang diarahkan untuk berkembang yaitu obyek wisata Jatiluwih.

4. Pembaharuan strategi untuk revitalisasi sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mencanangkan program “Gerbang Pangan Serasi” dalam rangka menggarap suatu kawasan-kawasan pertanian secara terintegrasi (lintas sektor) untuk memecahkan masalah pertanian dari hulu, tengah, dan hilir, termasuk pemberdayaan petani di kawasan terpilih dalam penguasaan teknologi pertanian. Saat ini telah terbentuk tidak kurang dari 30 kawasan yang masih dalam proses pembinaan dan pada tahun depan akan dipilih 10 kawasan lagi untuk digarap secara bertahap, lintas sektor, dan berkelanjutan.
5. Penataan ulang dan perluasan pembangunan pada Kawasan DayaTarik Wisata (KDWK) Tanah Lot. Kebijakan ini ditempuh dengan pertimbangan:
  - Terjadinya percampuran arus wisatawan dengan arus aktivitas spiritual
  - Masih banyaknya lahan-lahan kosong yang dapat dikembangkan
  - Dibutuhkan adanya diversifikasi produk (daya tarik) yang dapat dialokasikan pada ruang-ruang kosong yang masih ada.
  - Perlu perluasan areal terbangun untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang tersebut. Melalui penataan ulang kawasan ini diharapkan dapat lebih menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping itu, pada kawasan ini juga akan dibangun tempat untuk pagelaran promosi produk unggulan Tabanan dan pagelaran seni-budaya.

6. Akselerasi program untuk percepatan pembangunan dalam rangka penanganan sejumlah isu strategis melalui optimalisasi program unggulan dan terus menggali program inovasi serta mendorong program inovasi yang implementatif, seperti Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (pembentukan BUMDes), Program Pembangunan Infrastruktur (Gempur Miskin), Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa (Sapa Desa), Program Inovasi Kecamatan (Program Intan), Bedah Rumah, Kegiatan Santunan Kematian, Kewirausahaan Perikanan Budidaya, Beras Sehat, Program Bebas Kanker Serviks serta program unggulan lainnya.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Tabanan Tahun 2018 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD-SB Kabupaten Tabanan 2016 – 2021 yang merupakan tahun ketiga, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tabanan. Proyeksi kebijakan keuangan Kabupaten Tabanan Tahun 2018 dilakukan dengan analisa perkembangan keuangan daerah beberapa tahun terakhir serta menyesuaikan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

### **3.2.1.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada kaidah-kaidah aturan dan kebijakan yang ditetapkan.

### **3.2.1.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan, yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah, Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arahan yang jelas bagi daerah untuk mengatur daerah masing-masing sesuai kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dan tidak semata-mata bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan harus mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah harus terus dilakukan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif, terutama sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan tidak menghambat akselerasi perkembangan aktifitas pembangunan. Peningkatan PAD bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan yang kebutuhannya semakin meningkat seiring dinamika masyarakat.

Dalam beberapa kurun lima tahun terakhir (2010 – 2015), PAD mengalami perkembangan yang fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7. Dari tabel tersebut dapat disimak, bahwa PAD Kabupaten Tabanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun proporsi PAD Kabupaten Tabanan terhadap Belanja Daerah masih relatif kecil. Jika ditelaah lebih mendalam akan terlihat bahwa dari total PAD yang diterima sebagian besar berasal dari retribusi jasa pelayanan Rumah Sakit Umum dan pendapatan yang diterima tersebut akan dialokasikan kembali dalam jumlah yang sama untuk operasional rumah sakit.

**Tabel 3.7**  
Perkembangan PAD dan Belanja Daerah Tahun 2011-2016

NO	TAHUN	PAD	GROWTH (%)	BELANJA	PROPORSI PAD thd BELANJA (%)
		(Rp) dalam Juta		(Rp) dalam Juta	
1	2011	141.045,80		870.892,37	16,20%
2	2012	183.295,01	29,95%	1.066.914,72	17,18%
3	2013	255.418,22	39,35%	1.203.980,34	21,21%
4	2014	273.411,75	7,04%	1.353.147,39	20,21%
5	2015	312.008,17	14,12%	1.571.612,80	19,85%
6	2016	318.033,60	1,93%	1.873.512,51	16,98%
Rata-rata			18,48%		18,60%

Sumber: Laporan Perhitungan APBD 2010 – 2016 dan analisis

Oleh karena besarnya PAD Kabupaten Tabanan sebagian besar bersumber dari retribusi rumah sakit yang seluruh pendapatan tersebut harus dikembalikan ke rumah sakit, maka perlu dikaji secara mendalam kemampuan riil pemerintah daerah dalam membiayai seluruh sektor pembangunan. Selain itu, perkembangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak potensi dari kegiatan pariwisata yang belum optimal digali. Selain itu di tahun 2017 ada rencana penghentian sementara operasi Hotel Bali Nirwana Resort selama tiga tahun dikarenakan adanya renovasi total bangunan. Kondisi ini harus diantisipasi di tahun 2018

mengingat BNR merupakan penyeter terbesar pajak hotel dan restoran kepana Pemerintah Kabupaten Tabanan.

### **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan masih menjadi sumber dana yang dominan dalam APBD Kabupaten Tabanan. Besarnya dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.135.165.882.000,00 menurun dari jumlah yang diterima tahun 2016 yang besarnya Rp. 1.184.284.312.280,00. Dana perimbangan tersebut terdiri dari: dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (sumberdaya alam), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Sebagaimana diketahui, bahwa besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah ditentukan berdasarkan formulasi yang sudah baku. Dengan demikian besarnya dana perimbangan yang akan diperoleh sangat sulit untuk diintervensi oleh pemerintah daerah. Dari Tahun 2016, Pemerintah Pusat menerapkan prinsip floating pada dana perimbangan yang berarti besaran yang diterima dapat berkurang dari surat penetapan nilai yang akan terima jika pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan yang diminta dan jika terjadi pengurangan pendapatan negara. Hal ini perlu diantisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pemanfaatan SiLPA tahun berkenaan.

### **Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri dari: dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Bali, hibah pemerintah pusat, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar. Pendapatan dari pos ini sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun, Pada tahun 2016 dan 2017 lain-lain pendapatan yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabanan besarnya berturut-turut Rp. 371.637.107.352,33 dan Rp. 385.201.121.756,58. Pada tahun 2017 pembagian Bagi Hasil Pajak dan Restoran dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar akan mengalami perubahan format menjadi bantuan keuangan

khusus dengan nilai rata-rata yang kemungkinan bertambah. Untuk itu di tahun 2018 diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan.

### **Total Pendapatan**

Pendapatan daerah dalam kurun waktu 2011 – 2016 mengalami peningkatan rata-rata 12,68% (Tabel 3,8), Peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan relatif lebih kecil jika dibandingkan dari peningkatan yang berasal dari PAD dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 3.8  
Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya  
Tahun 2011 – 2016

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PENDAPATAN (Rp) dalam Juta</b>	<b>GROWTH (%)</b>
1	2011	886.306,10	
2	2012	1.056.319,33	19,18%
3	2013	1.253.026,82	18,62%
4	2014	1.367.063,68	9,10%
5	2015	1.625.927,89	18,94%
6	2016	1.791.935,80	10,21%
<b>Rata-rata</b>			<b>12,68%</b>

*Sumber Laporan Perhitungan APBD 2011 – 2016 dan analisis*

Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa masing-masing komponen pendapatan rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun jika melihat potensi dan kebijakan di tahun 2018 peningkatan pendapatan tidak akan besar. Oleh karena itu untuk tahun 2018, pendapatan daerah juga direncanakan mengalami peningkatan berkisar 2-3%.

### **Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Tabanan**

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan,
4. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima,

Sebagai gambaran pendapatan dari Kabupaten Tabanan yang memuat Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel 3,9,

Tabel 3.9  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tabanan  
Tahun 2015 s/d Tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Proyeksi/ Tahun Berjalan	Proyeksi	Proyeksi
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	6	7			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>312.008.167.539,27</b>	<b>318.033.600.631,19</b>	<b>327.462.528.850,00</b>	<b>391.506.556.502,50</b>	<b>414.996.949.892,65</b>
1.1.1	Pajak daerah	105.792.972.499,18	105.186.765.603,03	96.019.397.000,00	104.838.021.700,00	111.128.303.002,00
1.1.2	Retribusi daerah	46.997.048.631,63	44.161.311.430,44	21.833.196.200,00	23.382.703.520,00	24.785.665.731,20
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.322.114.267,68	8.741.999.292,44	7.322.114.000,00	8.054.325.400,00	8.537.584.924,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	151.896.032.140,78	159.943.524.305,28	202.287.821.650,00	255.231.505.882,50	270.545.396.235,45
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>815.846.444.833,00</b>	<b>1.102.265.093.170,00</b>	<b>1.135.165.882.000,00</b>	<b>1.135.165.882.000,00</b>	<b>1.203.275.834.920,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	17.441.962.833,00	23.775.524.756,00	27.130.191.000,00	27.130.191.000,00	28.758.002.460,00
1.2.2	Dana alokasi umum	722.004.642.000,00	826.283.780.000,00	826.283.780.000,00	826.283.780.000,00	875.860.806.800,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	76.399.840.000,00	252.205.788.414,00	281.751.911.000,00	281.751.911.000,00	298.657.025.660,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>498.073.273.957,35</b>	<b>371.637.107.352,33</b>	<b>385.201.121.756,58</b>	<b>366.587.009.149,34</b>	<b>388.582.229.698,30</b>
1.3.1	Hibah	92.000.000.000,00	98.465.513.920,03	61.213.907.154,00	14.252.107.154,00	15.107.233.583,24
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	157.674.594.957,35	162.018.334.432,30	158.426.760.602,58	186.774.447.995,34	197.980.914.875,06
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247.995.679.000,00	88.183.813.000,00	113.917.874.000,00	113.917.874.000,00	120.752.946.440,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	403.000.000,00	22.969.446.000,00	51.642.580.000,00	51.642.580.000,00	54.741.134.800,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>1.625.927.886.329,62</b>	<b>1.791.935.801.153,52</b>	<b>1.847.829.532.606,58</b>	<b>1.893.259.447.651,84</b>	<b>2.006.855.014.510,95</b>

Sumber:Laporan Perhitungan APBD dan analisis

### 3.2.1.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2018.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Tabanan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh

daerah), ruang fiskal Kabupaten Tabanan menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah enam (6) urusan, wajib non pelayanandasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah delapan (8) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah delapan (8) urusan;
2. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati;
3. Pemenuhan dana untuk pengentasan Kemiskinan;
4. Mendukung Program RPJMN 2015–2019 dan RKP 2018;
5. Pemenuhan dana pendidikan **20%** dari total belanja;
6. Pemenuhan dana fungsi kesehatan **10%**;
7. Penguatan desa melalui ADD sebesar 12,5%
8. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa pelaksana program
9. Bantuan keuangan kab/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
10. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
11. Mendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
12. Pemenuhan dana ekonomi kreatif/ekonomi kerakyatan berbasis desa;
13. Pengembangan sektor primer dan merangsang sektor sekunder;

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2018 dituangkan dalam Tabel 3.10.

**Tabel 3.10**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tabanan**  
**Tahun 2015 – 2019**

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Proyeksi /Tahun Berjalan	Proyeksi	Proyeksi
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
2.1.1	Belanja pegawai	818.155.618.662,24	910.740.327.400,75	847.890.937.910,00	847.890.937.910,00	876.900.453.328,35
2.1.2	Belanja bunga	44.197.461,94	31.394.350,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.332.000.000,00
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	45.344.113.150,00	37.395.400.000,00	38.387.000.000,00	38.387.000.000,00	38.387.000.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.204.500.000,00	2.926.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.498.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*	12.978.453.723,75	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	14.417.336.225,00	15.282.376.398,50
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	164.630.136.649,30	206.136.048.600,00	220.211.400.000,00	220.211.400.000,00	233.424.084.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	865.403.000,00	781.932.000,00	941.634.206,58	2.083.524.641,84	2.208.536.120,35
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.045.222.422.647,23</b>	<b>1.172.428.438.575,75</b>	<b>1.127.348.308.341,58</b>	<b>1.128.490.198.776,84</b>	<b>1.172.032.449.847,20</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>					
2.2.1	Belanja pegawai	33.326.142.260,62	27.227.324.263,00	37.984.094.456,83	31.106.803.529,33	32.683.387.270,35
2.2.2	Belanja barang dan jasa	376.074.136.811,50	415.917.997.115,91	580.235.807.828,29	475.179.980.802,50	499.263.491.378,79
2.2.3	Belanja modal	112.712.064.896,20	256.460.716.204,87	357.781.321.979,88	293.002.464.543,18	307.852.686.014,61
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>522.112.343.968,32</b>	<b>699.606.037.583,78</b>	<b>976.001.224.265,00</b>	<b>799.289.248.875,00</b>	<b>839.799.564.663,75</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.567.334.766.615,55</b>	<b>1.872.034.476.159,53</b>	<b>2.103.349.532.606,58</b>	<b>1.927.779.447.651,84</b>	<b>2.011.832.014.510,95</b>

*Sumber: Laporan Perhitungan APBD dan analisis*

## **Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

### **- Kebijakan Belanja Pegawai**

Belanja pegawai terutama untuk pembayaran gaji pegawai, tunjangan pegawai dan honorarium telah menyerap dana yang sangat besar dari APBD Kabupaten Tabanan oleh karena jumlah pegawai yang relatif banyak. Meskipun menyerap dana APBD yang sangat besar, besarnya gaji yang diterima oleh masing-masing pegawai rata-rata masih jauh dari kondisi yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak, Kondisi ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja dari pegawai.

Pada tahun 2018, kebijakan belanja pegawai diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tambahan pendapatan pegawai berupa pemberian beban kerja umum yang dikonversi dalam bentuk pemberian Berat Sehat. Skema ini merupakan model subsidi dimana manfaat akhirnya tidak saja dirasakan para pegawai tetapi berimbas pada kesejahteraan petani.

### **- Kebijakan Belanja Bunga**

Kebijakan belanja bunga dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tabanan diarahkan untuk pembayaran bunga hutang terdiri dari pembayaran bunga pada International Bank for Recontriction and Development (IBRD) dan Pembayaran bunga pinjaman daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Nyitdah.

### **- Kebijakan Belanja Subsidi**

Belanja subsidi sebagai bagian dari belanja tidak langsung digunakan untuk membantu biaya produksi perusahaan atau lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat,

### **- Kebijakan Belanja Hibah dan Belanja Sosial**

Kedua kelompok belanja mengacu pada Permendagri No 39 tahun 2012, Belanja hibah diperuntukan untuk belanja hibah pada Kepada

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan yang pengalokasiannya berdasarkan prinsip selektif, tidak mengikat, dan memiliki kejelasan peruntukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, khususnya PAD, Sementara belanja bansos, dialokasikan untuk penanganan kebencanaan terencana maupun tidak terencana, penanggulangan kemiskinan dan program santimas.

- **Kebijakan Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundangan guna memperlancar tugas pelayanan publik di kantor desa.

- **Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten pemerintah desa dalam rangka peningkatan dan atau pemerataan kemampuan keuangan desa dinas, subak dan desa pakraman, Bantuan keuangan yang bersifat umum, penggunaan dan peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan, Sedang bantuan keuangan yang bersifat khusus, pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

- **Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat atau kegiatan yang sifatnya tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### **a. Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja langsung yang dimaksudkan disini adalah belanja yang terkait dengan program yang dilaksanakan pada SKPD, Belanja langsung pada tahun 2018 terutama diprioritaskan pada belanja yang sifatnya mengikat dengan sumber pendapatan seperti belanja yang terkait dengan DAK, juga diporsikan untuk belanja yang wajib seperti belanja pada program pelayanan administrasi perkantoran dan lain-lain belanja yang mengikat.

Selain belanja yang sifatnya wajib dan mengikat tersebut, pada tahun 2018 juga diporsikan dana untuk belanja program unggulan yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir seperti Program Gerakan Pembangunan Pangan (Gerbang Pangan) menuju Tabanan Serasi, Gerbang Emas Serasi, Belanja program unggulan ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi terutama di desa di Kabupaten Tabanan. Sesuai tema yang diangkat dalam perencanaan pembangunan di tahun 2018, belanja langsung akan lebih dititikberatkan pada membangkitkan ekonomi berbasis pertanian yang menjadi basis kegiatan masyarakat Tabanan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah porsi pada belanja infrastruktur jalan.

Selain beberapa program di atas, kebijakan belanja juga diarahkan untuk membiayai program unggulan lainnya seperti :

1. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas Serasi)
2. Gerbang Pariwisata Serasi
3. Program Partisipatif Infrastruktur
4. Bedah Rumah
5. Bedah Warung
6. Trans Serasi
7. Kewirausahaan Perikanan Budidaya
8. Program Bebas Kanker Serviks
9. Peningkatan produksi pertanian dan pengembangan pengolahan hasil pertanian
10. Fasilitasi pengembangan BUMDes
11. Pelatihan SDM
12. Permodalan kelompok tani dan UMKM

13. Pendidikan
14. Kesehatan
15. Pelayanan Publik
16. Pembangunan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) di beberapa sektor

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.10.

### **3.2.1.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Sumber penerimaan pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir adalah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sampai saat ini, APBD Kabupaten Tabanan masih menganut pola anggaran "defisit" yang selalu dapat ditutupi dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya berasal dari pengembalian dana kegiatan yang tidak didukung oleh pertanggungjawaban administrasinya yang lengkap serta dari hasil negosiasi biaya pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Adapun Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Tabanan Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana Tabel 3.11 berikut.

Melihat gambaran di atas arah kebijakan pembiayaan untuk tahun mendatang yaitu dengan mengelola defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang mesti dikendalikan secara ketat karena sisa lebih anggaran tahun yang lalu jumlahnya akan semakin kecil dengan penerapan sistem anggaran kinerja. Anggaran kinerja dengan *output* (keluaran) yang terukur dan penggunaan input belanja berpedoman pada analisis standar belanja (ASB) maka sangat kecil kemungkinannya terjadi pengembalian uang yang menjadi sisa lebih oleh pengguna anggaran. Di tahun 2019 yang merupakan perkiraan maju, akan dilakukan pengembalian pinjaman kepada PT SMI yang telah digunakan untuk membangun Rumah Sakit Daerah di Desa Nyitdah. Sehingga pembiayaan netto akan menjadi kecil sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
Tahun 2015 s.d Tahun 2019

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Proyeksi/Target pada Tahun 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019
		2015	2016			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>121.968.327.787,74</b>	<b>148.047.430.241,12</b>	<b>65.000.000.000,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>55.457.000.000,00</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	121.329.373.787,74	147.395.759.741,12	65.000.000.000,00	45.000.000.000,00	55.457.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-			
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	638.954.000,00	651.670.500,00			
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>121.968.327.787,74</b>	<b>148.047.430.241,12</b>	<b>65.000.000.000,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>55.457.000.000,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>4.278.035.294,12</b>	<b>1.478.035.294,12</b>	<b>10.480.000.000,00</b>	<b>10.480.000.000,00</b>	<b>50.480.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	4.200.000.000,00	1.400.000.000,00	10.400.000.000,00	10.400.000.000,00	5.400.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	78.035.294,12	78.035.294,12	80.000.000,00	80.000.000,00	45.080.000.000,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.278.035.294,12</b>	<b>1.478.035.294,12</b>	<b>10.480.000.000,00</b>	<b>10.480.000.000,00</b>	<b>50.480.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>117.690.292.493,62</b>	<b>146.569.394.947,00</b>	<b>54.520.000.000,00</b>	<b>34.520.000.000,00</b>	<b>4.977.000.000,00</b>

Sumber: Laporan Perhitungan APBD dan analisis